

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
2021



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi hal inilah yang menjadi landasan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan di kota Gorontalo. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik sekaligus memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka pada tahun 2021 ini Pemerintah Kota Gorontalo menyediakan informasi dan data-data akurat melalui penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Gorontalo. Dokumen IKPLHD Kota Gorontalo tahun 2021 merupakan laporan kinerja dari Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengelola lingkungan dengan menggunakan model analisis kondisi D-P-S-I-R (Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response) terhadap lima isu prioritas lingkungan hidup.

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Gorontalo dilakukan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data dan pemutakhiran data.

- 1) Tahapan Persiapan diawali dengan pembuatan SK Tim Penyusun yang ditandatangani oleh Wali Kota Gorontalo melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (BAPPEDA, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, BPBD, Dinas Kesehatan dan PUPR), Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Gorontalo) dan Lembaga Kemasyarakatan (FKH, JAPESDA, dan Biota). Selanjutnya melakukan rapat koordinasi serta penetapan perumusan isu prioritas lingkungan hidup Kota Gorontalo.
- 2) Tahapan Pengumpulan Data dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan oleh tim pengumpul data yang diperoleh dari organisasi pemerintah daerah



dengan metode pengumpulan data survei primer dan sekunder. Hasil pengolahan data selanjutnya digunakan untuk proses analisis melalui rapat terbatas secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan bersama Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat serta rapat virtual melalui Zoom Meeting bersama Pusdatin KLHK dan DLHK Provinsi Gorontalo.

- 3) Tahap Pemutakhiran Data dilakukan bersama Bapak Wali Kota Gorontalo. Langkah ini dilakukan agar data dan informasi yang dipublikasikan pada laporan ini dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Tujuan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Gorontalo 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusun dan tersajinya informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Gorontalo secara lengkap dalam bentuk ringkasan bagi masyarakat secara umum dan berbagai pengambil keputusan secara khusus;
- 2) Tersajinya gambaran yang subyektif mungkin terhadap dampak kegiatan manusia (sosial ekonomi) maupun pengaruh gejala alam terhadap komponen kependudukan dan lingkungan hidup;
- 3) Sebagai alat bantu untuk mengevaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Gorontalo.

B. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup yang ada di Kota Gorontalo melalui rapat koordinasi yang telah dilakukan maka ditetapkan 5 (lima) isu lingkungan hidup yang diprioritaskan yaitu (1) tata guna lahan; (2) kualitas air sungai; (3) kualitas udara; (4) resiko bencana dan (5) perkotaan.

C. Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR)

Analisis DPSIR isu lingkungan hidup kota Gorontalo tahun 2021 adalah sebagai berikut:

C1. Tata Guna Lahan

Dilihat dari sudut pandang driving force, Kota Gorontalo memiliki luas yang relatif kecil sebagai ibukota Provinsi, dengan luas 79,59 km² dan sekitar 40% dari luas Kota Gorontalo merupakan lautan dan bukit. Informasi penggunaan lahan di Kota Gorontalo, terdiri dari persawahan (11%) dan



lahan hutan (5%) serta lahan non pertanian (36%), Penggunaan lahan non pertanian (36%) umumnya dipergunakan untuk kawasan perdagangan, fasilitas umum dan perumahan/pemukiman. Lahan non pertanian dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kegiatan industri baik industri kecil maupun industri besar.

Dari aspek force kebutuhan pemukiman akan mengalami peningkatan dan berimplikasi pada kebutuhan lahan. Diproyeksikan kebutuhan lahan Kota

Gorontalo akan hunian mencapai 8,975 Ha melebihi luas wilayah Kota Gorontalo yakni 6,479 Ha ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memerlukan lahan yang lebih untuk dapat menampung kebutuhan

Perumahan yang ideal. Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota

Gorontalo, perekonomian masih didominasi oleh sektor jasa dan sektor perdagangan. Pada tahun 2021, di Kota Gorontalo terdapat sekitar 180 perusahaan perdagangan, yang terdiri dari 28 PT, 60 CV, 6 UD dan 86 lainnya dan juga terdapat 39 pedagang besar, 79 pedagang menengah, dan 428 pedagang kecil. Kota Gorontalo memiliki 1 pasar umum yang beroperasi setiap hari dan 8 pasar kelurahan yang beroperasi pada hari-hari tertentu dari Senin sampai Minggu dan juga terdapat 264 koperasi yang tersebar di semua kecamatan. Sebagian besar koperasi di daerah ini merupakan KSU yakni sebanyak 69 unit. Pertumbuhan jumlah usaha tentunya akan mempengaruhi kebutuhan lahan sehingga tata guna lahan untuk kawasan perdagangan dan jasa pun sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tata Ruang tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Gorontalo 2019-2039.

Dari sisi aspek state, Kota Gorontalo merupakan salah satu kawasan perkotaan yang cepat pertumbuhannya berfungsi sebagai Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) sekaligus pusat Ibukota dan Pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di tetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Dalam rencana sistem pusat pelayan Kota Gorontalo terdapat 3 Pusat Pelayan Kota (PPK)



meliputi; Kawasan perdagangan jasa, Kawasan Pusat Jasa dan bisnis dan Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan.

Rencana Kawasan Hutan Lindung di Kota Gorontalo kawasan hutan lindung di Kota Gorontalo adalah 477 ha. Lokasi pengembangan kawasan Hutan Lindung di Kota Gorontalo berada di daerah perbukitan pada kemiringan lahan >40% dengan Luas kurang lebih 1.149 ha. Untuk saat ini kawasan ruang terbuka hijau kota misalnya Taman Kota di kota Gorontalo seluas 12 Ha.

Dari sudut aspek impact yakni berkurangnya lahan sawah produktif menyebabkan menurunnya produksi beras. Berdasarkan perhitungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo tahun 2021, produksi beras tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo sehingga memerlukan pasokan beras dari daerah lain serta meningkatnya kebutuhan lahan terhadap hunian dan ruang usaha/kegiatan akan berdampak pada penurunan ruang terbuka hijau dan resapan air sangat bermanfaat dalam pencegahan banjir, yang merupakan isu utama di Kota Gorontalo.

Dari sisi aspek response, Kota Gorontalo telah melakukan revisi Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 2019-2039, hal ini sangat penting untuk meminimalisir tata guna lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan mengurangi potensi penyalahgunaan alih fungsi lahan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 2019-2039, maka tidak ada lagi alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian yang dijadikan lahan pemukiman/hunian maupun kawasan perdagangan dan jasa. Selain itu, setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah/hunian/tempat usaha, pemohon baik perseorangan maupun badan usaha WAJIB menyediakan ruang terbuka hijau privat sebesar 20% dari luas bangunan. Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalisir potensi genangan maupun banjir yang terjadi di Kota Gorontalo.



C2. Kualitas Air Sungai

Dari segi aspek driving force, kualitas lingkungan perairan di lokasi perencanaan diwakili oleh kondisi kualitas biofisik sungai Bone yang merupakan salah satu sungai terbesar yang melintas di lokasi perencanaan. Koridor Sungai Bone merupakan sarana konservasi air bagi wilayah di sekitarnya karena menyediakan berbagai kebutuhan air, mulai dari air bersih, air untuk pertanian hingga kegiatan pariwisata. Adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, di wilayah Kabupaten Bone Bolango, yang walaupun berada jauh dari lokasi perencanaan yaitu Kota Gorontalo namun aktivitas di wilayah hulu sangat berpengaruh besar terhadap kualitas air dan kekayaan ekosistem.

Dari sisi aspek pressure, Sungai Bone yang merupakan salah satu sungai terbesar yang melintas di lokasi perencanaan. Tekanan terhadap badan air di sungai Bone terdiri dari 2 yaitu tekanan di wilayah hulu dan tekanan di wilayah hilir. Khusus di lokasi perencanaan maka tekanannya adalah tekanan wilayah hilir yang terdiri dari pendangkalan sungai, pencemaran air, tambang galian pasir, dan pemukiman dan pemukiman yang belum sesuai peruntukannya disepanjang bantaran sungai Sedangkan untuk tekanan di wilayah hulu adalah praktek penambangan emas tanpa ijin menyebabkan pencemaran merkuri (Hg) terhadap Sungai Bone pada bagian tengah sampai ke hilir. Disamping itu, tekanan yang dimiliki terhadap kualitas di Kota Gorontalo yaitu Pembangunan pemukiman di kawasan bantaran sungai Bone dan Bolango sangat berdampak pada kualitas air sungai. Pemukiman tersebut tidak memiliki sarana septictank maupun pengolahan air limbah sehingga "blackwater" langsung dibuang ke badan air. Hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas air sungai, utamanya parameter dan Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih tergolong rendah.

Dari sudut pandang aspek state, Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang letaknya paling selatan di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 79.59 km², terdiri dari 9 Kecamatan 50 Kelurahan dan merupakan



wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo. Di Kota Gorontalo terdapat sungai – sungai yang merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Sungai – sungai tersebut merupakan sarana dan prasarana yang vital bagi masyarakat dalam kehidupan sehari – hari sebagai sarana transportasi maupun sebagai bahan baku air minum, mandi dan cuci serta berbagai kegiatan seperti perikanan, dan juga sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah berbagai kegiatan yang ada disekitar.

Adapun lokasi pemantauan dalam rangka mengetahui kualitas air sungai dilakukan di beberapa Kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut : Sungai Tamalate, Sungai Bone dan Sungai Bolango dengan 6 (enam) titik pengambilan sampel air sungai masing-masing sungai terdapat 2 titik (hulu dan hilir). Tahun 2019, pengujian kualitas air sungai dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan Februari dan bulan November.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel air ke-1 dan ke-2 parameter-parameter yang melebihi baku mutu yaitu Fosfat, Total Dissolved Solid (TDS), Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Dissolved Oxygen (DO). Jika berdasarkan Klasifikasi Status Mutu Air Sungai di 6 (enam) titik, pada pengambilan sampel air sungai ke-1 terdapat 2 (dua) sungai memenuhi baku mutu dan 4 (empat) sungai termasuk kategori cemar ringan. Namun, pada pengambilan sampel air sungai ke-2 mengalami peningkatan kualitas air sungai. Hal ini dikarenakan terdapat 4 (empat) sungai memenuhi baku mutu dan 2 (dua) sungai termasuk kategori cemar ringan. Sehingga hasil Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 , untuk pengambilan sampel air sungaike-1 sebesar 56,6 dan pengambilan sampel air ke-2 sebesar 66,6.

Dari aspek impact, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat kualitas air sungai yang buruk sering dijumpai di Kota Gorontalo, walaupun bukan menjadi penyakit yang paling banyak diderita namun diare dan alergi serta scabies masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kota Gorontalo.



Dari sudut pandang aspek response, pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) menyediakan sarana pengolahan air limbah untuk kegiatan pembuatan tahu-tempe yang berada di bantaran sungai Tamalate. Kegiatan tersebut dipilih untuk mendapatkan IPAL karena hampir semua kegiatan pembuatan tahu-tempe tidak memiliki IPAL, sehingga air limbah yang dihasilkan dibuang langsung ke badan air sungai. Lokasi yang dipilih yaitu Industri Kecil Tahu Tempe "Putri Liana" Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur dan Industri Kecil Tahu Tempe "Sugianto" Jalan Cenderwasih Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur.

C3. Kualitas Udara

Dalam aspek driving force, kualitas udara yang dirasakan di Kota Gorontalo belum mengalami gejala penurunan yang sangat drastis. Kondisi kualitas udara di Wilayah Kota Gorontalo saat ini masih baik. Kontribusi polusi udara terbesar adalah berasal dari knalpot kendaraan bermotor yakni mencapai 60-70%, dari industri sebesar 10 – 15 % dan sisanya berasal dari aktifitas pembakaran sampah rumah tangga, dan lain-lain.

Dari segi aspek pressure, kualitas udara di Kota Gorontalo masih berada dalam status "BAIK", namun tetap harus menjadi perhatian agar status kualitas udara dapat selalu terjaga dengan baik. Poin-poin yang menjadi tekanan terhadap kondisi kualitas udara di Kota Gorontalo yakni kesadaran masyarakat di Kota Gorontalo dalam pengelolaan sampah utamanya pembakaran sampah masih sangat rendah dan Kota Gorontalo tidak memiliki sistem transportasi massal, sehingga jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi didalam Kota Gorontalo per harinya sangat padat. Ditambah dengan kondisi Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi dan pusat perdagangan dan jasa serta pusat perkantoran Pemerintah maupun swasta. Hingga lonjakan kendaraan bermotor pada jam dan hari kerja sangat tinggi.

Dari sudut pandang aspek state, kualitas udara di Kota Gorontalo berdasarkan hasil pelaksanaan Uji Emisi Tahun 2019 yang tersebar di 3



(tiga) lokasi yaitu di Jalan Jendral Sudirman (Halaman Samsat Kota Gorontalo), Jalan John A. Katili (Samping Kantor Radar) dan Jalan Nani Wartabone (Depan Toko Tania Fashion dan Hotel Kerawang). Jumlah total keseluruhan yang telah dilakukan uji emisi sebanyak 1.210 kendaraan dengan jumlah data uji Kendaraan yang Valid sebanyak 1.000 kendaraan. Jumlah kendaraan yang lulus sebanyak 817 kendaraan dan yang tidak lulus sebanyak 183 kendaraan.

Dari aspek impact, akibat tekanan dari kualitas udara yang terdiri dari pembakaran sampah, kurangnya penghijauan dan tidak adanya sistem transportasi massal di Kota Gorontalo menyebabkan kenaikan suhu udara dan Penyakit saluran pernapasan bagian atas merupakan penyakit yang paling mendominasi pada jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Kota Gorontalo. Hal ini dapat diakibatkan oleh tingginya pencemaran udara utamanya parameter Debu (Partikulat).

Dari sisi aspek response, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo sejak tahun 2012 bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo beserta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui program "Langit Biru", dan mulai tahun 2018 Kota Gorontalo melakukan secara mandiri, rutin melakukan uji emisi gratis pada kendaraan-kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Gorontalo, khususnya kendaraan roda empat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup Kota Gorontalo diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan. Kota Gorontalo mendapatkan penghargaan peringkat 1 untuk kategori Kota Sedang dalam Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada tahun 2019. Di tahun 2020, melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Gorontalo mendapat bantuan berupa 1 (satu) unit Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang di Taman Kota Gorontalo. Serta rutin melakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode Passive



Sampler sejak tahun 2012. Pengambilan sampel udara ambien dengan metode passive sampler dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo yang sudah diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mewakili musim kemarau dan musim penghujan.

C4. Resiko Bencana

Berdasarkan aspek driving force, sebagian Kota Gorontalo yang berada disekitar Sungai Bone dan Sungai Bolango di Kecamatan Kota Barat, Kota Selatan dan Kota Timur merupakan kawasan rawan banjir. Bahkan kawasan banjir mencapai pusat kota yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa utama yang sebenarnya sudah cukup jauh dari ke dua sungai tersebut di atas. Selain Sungai Bone dan Sungai Bolango, Sungai Tamalate juga merupakan salah satu sungai penyebab banjir di Kota Gorontalo, terutama di bagian Timur kota. Selain itu, Kota Gorontalo khususnya di sepanjang perbukitan Kecamatan Kota Timur, serta lokasi bekas galian C di Kecamatan Kota Selatan dan Kota Barat merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor karena kawasan berlereng curam.

Dari segi aspek pressure, Kota Gorontalo tergolong daerah yang berpotensi tinggi /rawan gempa bumi. Gempa bumi di daerah ini diakibatkan oleh aktivitas jalur penunjaman Sulawesi Utara di laut dan sesar aktif yang ada di daerah ini baik yang terdapat di darat maupun di laut. Oleh karena itu, penanganan maupun antisipasi terhadap kondisi potensi rawan bencana di Kota Gorontalo, merupakan isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dalam penanganan dan pencegahannya. Poin-poin yang menjadi tekanan terhadap resiko bencana di Kota Gorontalo yaitu; (1) rusaknya hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone dan Bolango dan (2) Terdapatnya pemukiman warga di kawasan bantaran sungai menyebabkan timbulnya korban jiwa, baik mengungsi maupun meninggal, akibat bencana banjir.



Dalam aspek state, intensitas banjir di Kota Gorontalo selama tahun 2020 telah sebanyak 14 kali, dengan total luas genangan akibat banjir adalah 93,69 Ha, yang tersebar di 3 kecamatan yakni Hulondhalangi, Kota Timur dan Dumbo Raya. Dengan adanya penambahan saluran dan perbaikan drainase di Kota Gorontalo tahun 2021 kota Gorontalo tidak mengalami banjir. Hal ini menjadikan Kota Gorontalo merupakan wilayah yang rawan bencana dengan indeks resiko bencana sebesar 69,23 (sedang).

Dari sisi aspek impact, rusaknya check daam di Kota Gorontalo akibat bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Buliide dan Kelurahan Tuladengi Kota Gorontalo. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020, korban jiwa (mengungsi) akibat bencana banjir di Kecamatan Kota Timur mencapai 600 jiwa, di Kecamatan Dumbo Raya mencapai 7.450 jiwa dan Kecamatan Hulonthalangi sebanyak 692 jiwa. Selain itu, Kampung Tangguh yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo merupakan program yang memiliki tujuan untuk menguatkan kapasitas aparat dan pemerintah pada tingkat Kelurahan dalam menanggulangi maupun bencana. Termasuk wabah Covid 19 yang telah ditetapkan sebagai Bencana Darurat Nasional. Posko Kampung Tangguh merupakan titik-titik kumpul ketika terjadi darurat bencana yang terjadi di Kota Gorontalo.

Dari sudut pandang response, Kota Gorontalo telah melakukan perbaikan dan revitalisasi bantaran Sungai Bone dan Bolango, kemudian menganggarkan revitalisasi drainase di Kota Gorontalo pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 8.493.196.950 dan Revisi Masterplan Sistem Drainase Kota Gorontalo

C5. Perkotaan

Berdasarkan aspek driving force, di Indonesia terdapat sekitar 16% komposisi sampah plastik dari total timbunan sampah secara Nasional. total timbunan sampah tersebut hanya sekitar 10 – 15% yang telah didaur. Di





TPA tertimbun sekitar 60-70%, dan 15 – 30% yang belum dikelola dan tercemar ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut.



Sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Paradigma pengelolaan sampah masih terbatas pada siklus pengumpulan sampah, diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Upaya menanggulangi volume sampah yang terus meningkat dengan cara membangun bank sampah pun belum berjalan maksimal. Pasalnya, dari 1900 bank sampah di Indonesia, hanya 30% nya saja yang beroperasi (KLHK, 2015). Keberadaan bank sampah dibentuk secara swadaya dimana keberlangsungannya tergantung pada masyarakatnya sendiri, sehingga upaya untuk terus meningkatkan jumlah bank sampah yang efektif serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurangi volume sampah harus terus diupayakan.

Dalam aspek pressure, Kota Gorontalo memiliki visi dan misi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, merupakan ibukota Provinsi Gorontalo yang sangat berkembang berada pada posisi strategis peningkatan penduduk. Berkembangnya usaha dan/atau kegiatan yang dapat meningkatkan perkeekonomian mikro maupun makro di Kota Gorontalo. Laju perkembangan kawasan perkotaan Gorontalo akan melampaui batas administrasi Kota Gorontalo dengan adanya penambahan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang mencapai 2.590 jiwa akan memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Gorontalo sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah.

Dari sudut pandang state, Sumber sampah di Gorontalo berasal dari berbagai aktivitas kegiatan penduduk yang terkonsentrasi pada lokasi seperti pemukiman, komersil dan fasilitas umum. Setiap sumber sampah memiliki karakteristik tersendiri untuk timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Dalam kegiatan penyusunan rencana induk ini, sumber sampah terbagi atas rumah tangga dan non-rumah tangga. Persentase pelayanan sampah di Kota Gorontalo adalah sebesar 87% dari total penduduk Kota Gorontalo yang berjumlah jiwa.



Sumber sampah yang dilakukan observasi oleh tim penyusun KAJIAN ilmiah Jakstrada (2018), dilakukan terhadap perumahan/kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, restoran, hotel, terminal, pasar, fasilitas publik (taman dan GOR), fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah adiwiyata. Sumber sampah rumah tangga yang digunakan dalam observasi ini terdiri atas 9 jenis sumber berbeda. Satuan yang akan digunakan untuk timbulan sampah dari sumber sumber tersebut adalah kg/orang/hari. Berdasarkan SNI19-3983-1995 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia, maka Kota Gorontalo menggunakan standar 0,7kg/orang/hari sehingga diperoleh total jumlah timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk adalah $0,7\text{kg} \times 201.728$ jiwa adalah sebesar 141.209,6 ton/hari.

Penanganan sampah Kota Gorontalo terdiri dari 5 (lima) sub sistem kegiatan yaitu pemilahan/ pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Saat ini sebagai alat pewadahan telah dimiliki 357 unit tong sampah gantung, dan 14 unit. Berdasarkan Dokumen Fasilitasi Kelembagaan TPA Regional Talumelito untuk Menerapkan PPK-BLUD, dijelaskan bahwa pola pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menerapkan konsep lama yaitu "Kumpul-Angkut-Buang".

Secara umum untuk semua jalur layanan sampah sudah terlayani di seluruh kecamatan walaupun belum menjangkau secara keseluruhan kawasan permukiman perumahan dikarenakan kondisi topografi di Kelurahan Tanjung Kramat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan layanan angkutan sampah pada tahun 2019 sebanyak 268 jalur layanan dari 2018 yang hanya 264 jalur layanan. Sedangkan pada tahun 2021 ini, sudah mencapai 272 jalur dari 307 jalur yang ada di Kota Gorontalo. Keterbatasan sarana prasarana sering menjadi salah satu faktor dalam hal pelayanan penanganan sampah secara merata.

Pengelolaan sampah di Kota Gorontalo adalah dibawa ke TPA Talumelito yang merupakan TPA regional Provinsi Gorontalo. Di lokasi TPA terdapat mesin dan rumah kompos sebanyak 3 unit dengan kapasitas 5





m³/unit. Proses komposting dilakukan oleh petugas/ pengelola TPA. Dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari Kota Gorontalo dilakukan di TPA Regional Talumelito.

Dalam pengurangan sampah di Kota Gorontalo meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan tata cara pengurangan sampah dapat dilakukan sebagai berikut; (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan (2) mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Kota Gorontalo telah memiliki 9 TPS3R yang tersebar di 7 Kecamatan.

Untuk aspek impact, kondisi topografis Kota Gorontalo yang berada pada lereng dan bukit menyulitkan armada untuk mencapai di beberapa Kelurahan di Kota Gorontalo. Layanan armada kebersihan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kendaraan yang tidak layak, sehingga lebih sering rusak ketimbang beroperasi. Hal ini menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk mengalokasikan penganggaran secara tepat. Layanan armada yang tidak bisa menjangkau keseluruhan wilayah Kota Gorontalo, mengakibatkan masyarakat banyak membuang sampah yang dihasilkan ke badan air sungai, laut maupun selokan yang pada akhirnya dapat menyebabkan banjir. Selain itu, penyebab kualitas udara menurun akibat pengelolaan sampah yang buruk adalah budaya membakar sampah yang sering dilakukan oleh masyarakat Kota Gorontalo.

Dari sisi aspek response, Kota Gorontalo telah melakukan penambahan TPS3R. Pembangunan TPS3R di Kota Gorontalo berkembang di masa Pemerintahan Bapak Wali Kota Marten A.Taha , Se. M.Ec.Dev. Di mulai Tahun 2015, TPS3R saat ini telah berjumlah 9 unit yang tersebar pada 7 Kecamatan. Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo melakukan penambahan armada pengangkutan sampah serta Aturan Hukum tentang Retribusi.



D. Inovasi Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan komponen-komponen lingkungan hidup. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggunaan sumberdaya alam haruslah selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi Gorontalo memiliki pertumbuhan kawasan terbangun yang sangat pesat. Pertumbuhan ini secara alamiah menuntut tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi masyarakatnya. Untuk itu antara pelestarian sumber daya dengan pembangunan berkelanjutan diperlukan suatu agenda pengelolaan lingkungan yang disusun melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang telah dilaksanakan, serta pengkajian dan pengembangan program-program kerja baru.

Terdapat 6 (enam) program kegiatan inovasi pengelolaan di bidang lingkungan hidup pada Tahun 2020 terdiri dari 5 sumber anggaran APBD dan 1 sumber anggaran DAK yakni sebagai berikut: Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, Program Pemulihan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan Penyediaan Alat Angkut Sampah (DAK).

E. Penutup

Kota Gorontalo menetapkan 5 (lima) isu lingkungan hidup yang diprioritaskan yaitu (1) tata guna lahan; (2) kualitas air sungai; (3) kualitas udara; (4) resiko bencana dan (5) perkotaan. Demikianlah ringkasan eksekutif ini dibuat dan semoga dokumen ini berkenaan diterima untuk dinilai dan dipertimbangkan kelayakannya sebagai pertanggungjawaban publik Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan lingkungan hidup.